

KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BETELEME KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Novita Taangga^{1*}, Juemi², Muhammad Husain Borahima³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

14-05-2026

Disetujui:

20-07-2026

Dipublikasi:

02-08-2026

Kata Kunci:

*Kinerja Perangkat Desa;
Program Keluarga
Harapan; Efektivitas
Program; Pelayanan Publik*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui pendataan, penyampaian informasi, dan koordinasi dengan pendamping program. Namun, proses pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan verifikasi lapangan, serta dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat menilai Program Keluarga Harapan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat desa, terutama dalam aspek pendataan, validasi, koordinasi, dan pembaruan data penerima manfaat secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang dirancang pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan, validasi, serta pengawasan terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, perangkat desa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.

Pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan akurasi data penerima manfaat. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis sering kali tidak diikuti oleh proses pemutakhiran data secara berkala sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran (inclusion error maupun exclusion error). Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi efektivitas program, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik, kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola informasi, membangun koordinasi, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Dwiyanto, 2006; Gibson et al., 1997).

Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Beberapa masyarakat yang dinilai telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang dipandang layak justru belum memperoleh manfaat program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat masih memerlukan perhatian agar pelaksanaan program lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam perspektif administrasi publik, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas data, tetapi juga mencerminkan kinerja perangkat desa sebagai pelaksana pelayanan publik di tingkat lokal. Robbins (2016) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang diukur melalui kualitas pekerjaan, efektivitas pelaksanaan tugas, ketepatan waktu, serta kemampuan individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja aparatur desa yang baik akan mendukung terciptanya tata kelola program yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, efektivitas organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga pembaruan data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Gibson et al., 1997).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat pelaksana. Hakim (2024) menjelaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan ketepatan sasaran, tata kelola program, serta kemampuan pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penelitian Teturan (2023) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dipengaruhi oleh koordinasi antarpelaksana, proses evaluasi, serta ketepatan penetapan penerima manfaat. Sementara itu, Pausi et al. (2025) menegaskan bahwa organisasi publik yang adaptif memiliki kemampuan lebih baik dalam merespons perubahan lingkungan melalui penguatan koordinasi, pembelajaran organisasi, dan penyempurnaan proses kerja secara berkelanjutan. Di sisi lain, Dhanpat (2026) menyatakan bahwa peningkatan kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas utama, tetapi juga oleh perilaku kontekstual yang mendukung efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas program bantuan sosial maupun kinerja organisasi publik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian program atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang mengkaji bagaimana kinerja perangkat desa memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tingkat implementasi, khususnya dalam proses pendataan, validasi, dan koordinasi pelaksanaan program di tingkat desa, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat desa memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta mengidentifikasi berbagai faktor

yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat desa, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendataan, validasi, dan tata kelola Program Keluarga Harapan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses pendataan, validasi penerima manfaat, koordinasi antarpelaksana program, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi PKH.

Penelitian dilaksanakan di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan adanya fenomena ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial yang diduga berkaitan dengan proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga penyelesaian analisis.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat desa. Informan terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan data bantuan sosial, pendamping Program Keluarga Harapan, serta masyarakat yang menerima maupun tidak menerima bantuan sebagai sumber informasi untuk memperoleh berbagai perspektif mengenai pelaksanaan program.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas perangkat desa, mekanisme pendataan dan validasi penerima manfaat, koordinasi dalam pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen administrasi, peraturan, arsip, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi berdasarkan tema-temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang hingga diperoleh interpretasi yang konsisten mengenai kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beteleme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian disusun berdasarkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian di Desa Beteleme,

Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi pola, mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan makna, kemudian merumuskan tema-tema utama yang menggambarkan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan proses analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan empat tema utama, yaitu: (1) kualitas pendataan dan validasi penerima Program Keluarga Harapan belum optimal; (2) pelaksanaan tugas perangkat desa dalam mendukung Program Keluarga Harapan; (3) hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan (4) persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Keempat tema tersebut selanjutnya diuraikan secara rinci untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan PKH di Desa Beteleme.

1. Kualitas Pendataan dan Validasi Penerima Program Keluarga Harapan Belum Optimal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Beteleme telah melaksanakan proses pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pendataan dilakukan sebagai dasar penetapan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meskipun demikian, proses validasi dan pembaruan data belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, terdapat warga yang dinilai memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin justru belum terdaftar dalam program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pemutakhiran data belum mampu mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara cepat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas kinerja perangkat desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan pendataan, tetapi juga oleh konsistensi dalam melakukan validasi lapangan serta pembaruan data penerima manfaat secara berkala.

2. Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa dalam Mendukung Program Keluarga Harapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Koordinasi antara pemerintah desa dengan pendamping PKH telah berlangsung dalam proses pendataan maupun penyampaian informasi kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi beberapa keterbatasan. Informan menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi lapangan belum dapat dilakukan secara rutin sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu dapat segera teridentifikasi. Kondisi ini berdampak terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas perangkat desa telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh intensitas koordinasi, ketersediaan waktu, serta pelaksanaan monitoring di lapangan.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Penelitian menemukan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beteleme berkaitan dengan proses pembaruan data penerima manfaat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis belum selalu diikuti oleh pembaruan data secara cepat sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data administrasi.

Selain itu, keterbatasan pelaksanaan verifikasi langsung ke lapangan menjadi faktor yang memengaruhi ketepatan penetapan penerima bantuan. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan karena masih terdapat keluarga yang dianggap telah mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang dinilai layak belum memperoleh manfaat program.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PKH tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada kualitas pengelolaan data dan mekanisme evaluasi penerima manfaat secara berkelanjutan.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menilai Program Keluarga Harapan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Program ini dipandang mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang masih berada pada kondisi rentan.

Namun demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program belum sepenuhnya merata. Sebagian informan masih menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan sebagai persoalan utama yang perlu diperbaiki. Masyarakat berharap pemerintah desa melakukan pembaruan data secara berkala sehingga bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Secara umum, masyarakat tetap memberikan penilaian positif terhadap keberlanjutan Program Keluarga Harapan, namun mengharapkan adanya peningkatan kualitas pendataan, validasi, dan pengawasan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan desa, khususnya dalam proses pendataan, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pendamping PKH. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tersebut belum sepenuhnya menghasilkan data penerima manfaat yang akurat karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas administratif belum secara otomatis mencerminkan kualitas kinerja yang optimal. Menurut Robbins (2016), kinerja tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kualitas hasil kerja, efektivitas pelaksanaan tugas, ketepatan waktu, dan kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sejalan dengan itu, Dhanpat (2026) menjelaskan bahwa kinerja pegawai tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas utama (task performance), tetapi juga perilaku kontekstual (contextual performance) yang mendukung efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses pendataan dan validasi penerima manfaat masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembaruan data yang belum dilakukan secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan belum terakomodasi dalam Program Keluarga Harapan. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya prosedur administrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memberikan pelayanan yang akurat, adil, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Setiady et al. (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kinerja aparatur dipengaruhi oleh dukungan pimpinan, pelatihan, dan kemampuan berbagi pengetahuan dalam organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efektif.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa koordinasi antara perangkat desa dengan pendamping PKH telah berjalan dan menjadi faktor pendukung pelaksanaan program. Namun demikian, koordinasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis. Perubahan status ekonomi keluarga penerima manfaat memerlukan mekanisme pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan agar keputusan penetapan penerima bantuan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Gibson et al. (1997) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan

lingkungan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Pausi et al. (2025) menegaskan bahwa organisasi adaptif mampu meningkatkan efektivitas proses bisnis melalui koordinasi yang lebih baik, fleksibilitas organisasi, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan PKH tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa memperbarui informasi penerima manfaat sesuai dinamika masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memberikan penilaian positif terhadap keberadaan Program Keluarga Harapan karena dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Program tersebut masih dipandang memiliki kontribusi dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, tingkat kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang diterima, tetapi juga oleh persepsi mengenai keadilan dalam penetapan penerima bantuan. Ketika masyarakat menemukan adanya penerima yang dianggap tidak lagi layak memperoleh bantuan, maka kepercayaan terhadap pelaksanaan program cenderung menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Teturan (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas koordinasi antarpelaksana, serta proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Temuan ini juga didukung oleh Hakim (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketepatan implementasi, kualitas tata kelola program, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beteleme tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pelaksanaannya di tingkat desa. Akurasi pendataan, validasi penerima manfaat, koordinasi antar pelaksana, serta pembaruan data secara berkala merupakan komponen yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan data, penguatan koordinasi dengan pendamping PKH, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan desa, terutama dalam proses pendataan, penyampaian informasi, serta koordinasi dengan pendamping program. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan masih memerlukan penguatan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat desa, khususnya dalam aspek koordinasi, verifikasi lapangan, dan pembaruan data penerima manfaat. Meskipun masyarakat pada umumnya merasakan manfaat program dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, masih terdapat harapan agar proses pendataan dan evaluasi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan sehingga keadilan dalam penyaluran bantuan dapat terwujud.

Temuan penelitian menegaskan bahwa peningkatan efektivitas Program Keluarga Harapan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kapasitas perangkat desa dalam mengelola data, melakukan koordinasi antarpelaksana, serta melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan sistem pemutakhiran data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bahwa manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

REFERENSI

- Dhanpat, N. (2026). *The relationship between task and contextual performance and work engagement*. *SA Journal of Industrial Psychology*, 52, Article a2419. <https://doi.org/10.4102/sajip.v52i0.2419>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1997). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses* (9th ed.). Erlangga.
- Hakim, L. (2024). Dinamika kemiskinan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Pangripta Sembada: Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 24–39. <https://journal.slemankab.go.id/index.php/jps/article/view/13>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pausi, M., Kurniawati, N., Nurhaimah, N., & Utama, R. E. (2025). Desain organisasi adaptif: Kunci peningkatan kinerja sumber daya manusia dan optimalisasi proses bisnis di Kementerian Pekerjaan Umum. *Syntax Idea*, 7(10). <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i10.13749>
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Setiady, I. N., Al Mujahidin, M., Ismamudi, Hermawan, E., Khoirun Nisa, L., & Damayanti, I. (2021). Perilaku berbagi pengetahuan: Pemediasi dukungan pimpinan, pelatihan dan *self-efficacy* terhadap kinerja guru. *MASTER: Jurnal Manajemen Strategik Kewirausahaan*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.37366/master.v1i1.147>
- Teturan, Y. E. (2023). Efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(1), 76–85.